



KLIPING DIGITAL

Agama dan Keagamaan

Edisi: Senin, 25 November 2019

**PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG & DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA**

Kampus PTKI Harus Pelopori Moderasi

● BOWO PRIBADI,
ZAHROTUL OKTAVIANI

SEMARANG — Senat Mahasiswa (Sema) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia akan menerapkan moderasi beragama di lingkungan kampus masing-masing. Ketua Dema UIN Walisongo Prio Ihsan menjelaskan, moderasi beragama di lingkungan kampus keagamaan menjadi penting untuk menangkai ekstremisme dan intoleransi di kampus masing-masing.

"Sebelum pemahaman yang sama bisa ditularkan kepada masyarakat yang ada di luar kampus, maka moderasi beragama harus diimplementasikan di dalam kampus," ungkap dia usai pertemuan Sema dan Dema PTKI se-Indonesia di Semarang, Ahad (24/11). Menurut Prio, implementasi penerapan moderasi beragama menjadi bagian dari kesepakatan pertemuan yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, tersebut.

Selain di lingkungan kampus PTKI, lanjut Prio, temu SEMA dan DEMA PTKI juga menghasilkan kesepakatan agar semua peserta forum tersebut mampu

menyebarkan nilai moderasi beragama kepada masyarakat luas. Hal ini sebagai tindak lanjut rancangan aksi untuk menangkai penyebaran paham ekstremisme dan intoleransi di masyarakat.

Untuk mendukung rancangan aksi, upaya ini juga bisa dilakukan dengan memperbanyak sosialisasi konten moderasi beragama melalui media sosial.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah pada rancangan aksi Sema dan Dema PTKI, Kementerian Agama (Kemenag) juga mencanangkan untuk mengampunyeakan moderasi beragama sebagai salah satu alternatif mencegah paham ekstremisme dan intoleransi.

"Melalui kesepakatan ini pula, SEMA dan DEMA PTKI berharap langkah berama dalam melawan paham radikalisme – baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus bisa dilaksanakan secara lebih masif," ujar dia.

Kasubdit Sarana Prasarana dan kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Ruchman Basori, menjelaskan, mahasiswa di lingkungan PTKI tentunya sangat cukup bekal serta lebih inovatif

dalam menghasilkan narasi maupun konten moderasi beragama. Hal ini menjadi kekuatan dalam rangka melakukan aksi-aksi moderasi beragama, yang diwujudkan dalam berbagai program kemahasiswaan. Termasuk dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa).

Bangun sarana kampus

Pengembangan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terus dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam Kemenag. Pada 2020, Kemenag mengalokasikan lebih Rp 399 miliar untuk membangun delapan PTKIN melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Arskal Salim GP, menjelaskan, delapan PTKIN yang diberi amanah SBSN 2020, yaitu UIN Imam Bonjol Padang, UIN STS Jambi, UIN Raden Intan Lampung, UIN SMH Banten, UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Pekalongan, hingga IAIN Palu "Total anggaran SBSN 2020 senilai Rp 399.873.584.100," tutur Arskal Salim. ■ ed: a syalaby ichsan

Media : Republika
Rubrik : Khazanah
Halaman : 12



Aktor Lokal Picu Intoleransi

Semakin dinamis dan toleran para aktor lokal, maka semakin rendah pula pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

ABDILLAH MUHAMMAD MARZUQI
abdillah@mediaindonesia.com

SETARA Institute menyebut Jawa Barat sebagai daerah dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia. Intoleransi paling banyak berkaitan dengan kebebasan beragama.

"Intoleran di Jabar tinggi sekali. Banyak aktor lokal yang secara terus-menerus melakukan persekusi terhadap minoritas, misalnya oleh ormas Garis (Gerakan Reformasi Islam)," ungkap Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, dalam diskusi bertajuk

Pemajuan Toleransi di Daerah Input untuk Menag dan Mendagri, di Jakarta, kemarin.

Dengan merujuk pada riset longitudinal Setara Institute, Halili menyatakan terdapat 629 pelanggaran kebebasan beragama di Jabar selama 12 tahun terakhir. Jumlah itu mengalahkan DKI Jakarta dengan 291 kasus, Jatim 270 kasus, Jateng 158 kasus, Aceh 121 kasus, Sulsel 112 kasus, Sumut 106 kasus, Sumbar 104 kasus, Banten 90 kasus, dan NTB 76 kasus.

Selanjutnya, dalam lima tahun terakhir, yakni 2014-2019, total pelanggaran kebebasan beragama di

Jabar sebanyak 162 pelanggaran. Angka ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan DKI Jakarta dengan 113 kasus, Jatim 98 kasus, Jateng 66 peristiwa, Aceh 65 peristiwa, DI Yogyakarta 37 peristiwa, Banten 36 peristiwa, Sumut 28 peristiwa, Sulsel 27 peristiwa, dan Sumbar 23 peristiwa.

Pendekatan ke daerah

Halili meminta pemerintah melakukan pendekatan ke daerah-daerah agar jumlah pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia bisa berkurang. Dengan mendekati diri ke aktor lokal, katanya, pemerintah akan bisa menjaga kerukunan umat beragama. "Jangan lupa di tingkat lokal, salah satu yang memengaruhi tingkat toleransi ialah aktor lokal. Semakin dinamis aktor lokal, maka semakin rendah

pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan," tukasnya.

Menurutnya, aktor lokal yang dimaksudkan, antara lain kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). "Terkait dengan aktor lokal yang intoleran, saya kira kita tidak bisa menutup mata bahwa JAD salah satu yang sering melakukan tindakan, tapi negara tidak melakukan apa pun," terang Halili.

Dia mencontohkan pembubaran bakti sosial di sebuah gereja di Bantul yang dibiarkan. "DIY paling tidak kami mengidentifikasi 4 faktor kunci. Pertama, faktor institusi. Kedua, faktor regulasi. Ketiga, faktor intoleran. Keempat, masyarakat. Empat faktor itu memengaruhi secara simultan situasi DIY," pungkasnya.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menambahkan kegiatan alumni 212 tak

membantu pembangunan kebinekaan di Indonesia. Kegiatan itu hanya memikirkan kepentingan salah satu kelompok. "Harus dipahami kegiatan eksklusif yang selama ini dilakukan 212 itu tidak membantu bagi kebinekaan di Indonesia," katanya.

Kelompok itu dinilai bersikap diskriminatif terhadap kelompok kepentingan lain dan tidak membuka diri dan mengajak kelompok lain dalam berbagai kegiatan mereka. "Perlu juga kelompok 212 untuk berpikir ulang, bahkan kalau mau, ya ajak kelompok-kelompok lain untuk mengadakan aktivitas yang lebih inklusif," ujar Bonar.

Dia tak mempermasalahkan reuni alumni 212 yang bakal digelar 2 Desember mendatang. "Itu boleh-boleh saja. Tidak ada undang-undang yang dilanggar," pungkasnya. (Medcom/P-3)

Media : Media Indonesia

Rubrik : Hukum

Halaman : 5



Masih Ada Intoleransi di Sekolah di Jateng

SEMARANG, KOMPAS — Sikap intoleransi masih kerap terjadi pada sejumlah kegiatan belajar dan kesiswaan di Jawa Tengah. Penguatan pendidikan karakter pun menjadi penting dan guru berperan memberi pemahaman untuk saling menghormati.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng Jumeri mengatakan, pada semester I tahun 2019, pihaknya menerima 573 pengaduan terkait persoalan integritas dan solidaritas. Pengaduan integritas, di antaranya soal pungutan liar, korupsi, dan profesionalitas pendidik. Sementara pengaduan solidaritas, di antaranya, kasus intoleransi dalam kegiatan pembelajaran, kerohanian, ekstrakurikuler, dan kesiswaan.

Pada seminar nasional "Digitalisasi Pengelolaan Pembelajaran dan Penguatan Pendidikan Karakter" di kampus Universitas PGRI Semarang, Ming-

gu (24/11/2019), Jumeri menuturkan, kasus intoleransi antar-penganut agama berbeda ataupun antar-penganut agama yang sama. Adanya perbedaan pemikiran keagamaan kerap kali membuat sebagian pihak lain tidak dapat menerima.

Ia pun berharap anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat menekan hal itu.

"Inilah pentingnya pendidikan karakter. Terlalu banyak pengaduan akan memakan banyak waktu dan energi sehingga tak bisa berpikir strategis," ucap Jumeri. Ia menambahkan, 97 persen dari pengaduan itu sudah ditindaklanjuti.

Slamet Sugiyanto (35), guru SDN 1 Aribaya, Kabupaten Banjarnegara, menuturkan, guru memiliki peran dalam memberi pemahaman pentingnya saling menghormati antarumat beragama. Dengan demikian, su-

asana belajar pun dapat berlangsung kondusif.

Menurut dia, hal itu penting mengingat saat ini banyak informasi yang beredar di media sosial dan kebenarannya dipertanyakan. "Hal tersebut bisa menimbulkan meruncingnya perbedaan karena ada letupan-letupan. Ini bisa berujung pada perpecahan," kata Slamet.

Rektor Universitas PGRI Semarang yang juga Ketua PGRI Jateng Muhdi mengatakan, pihaknya ke depan fokus pada penguatan pendidikan karakter. Hal itu sejalan dengan dorongan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

"Pendidikan Indonesia ke depan harus menghasilkan generasi berkarakter. Apabila mereka tak disiapkan, bangsa ini tak akan menikmati bonus demografi. Kuncinya pada guru. Guru yang punya kapabilitas dan sejahtera," katanya. (DIT)

Media : Kompas
Rubrik : Nusantara
Halaman : 14



Perhatikan Guru Ngaji

● UMAR MUKHTAR

Pemerintah sudah memberikan insentif untuk guru pendidikan Alquran.

JAKARTA — Kesejahteraan guru *ngaji* dinilai masih jauh dari layak. Ketua DPP Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Said Aldi al-Idrus pun meminta agar pemerintah lebih memperhatikan para guru khususnya yang bergerak di Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan Taman Kanak-Kanak Alquran (TKA).

Said menjelaskan, setidaknya ada 928 ribu guru yang aktif mengajar di TPA dan TKA. Menurut dia, hampir 40 persen dari mereka dibayar hanya Rp 100 ribu per bulan.

"Guru ngaji yang mengajar 20 sampai 30 generasi Qurani kita," ujar Said kepada *Republika*, Ahad (24/11).

Said mengatakan, guru-guru TPA maupun TKA yang berada di bawah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TKA BKPRMI tentu tulus dalam mengajarkan Alquran. Namun, kata dia, guru-guru itu juga manusia. Mereka butuh insentif untuk memenuhi kebutuhannya. "Bukan mengayakannya."

Menurut Said, salah satu kabupaten di Jawa Barat bahkan membayar guru ngaji hanya Rp 75 ribu per bulan. Dia heran kepada bupati di kabupaten itu karena tidak ada kepedulian terhadap guru-guru ngaji. Padahal, menurut dia, ada dana desa yang bisa digunakan untuk menambah insentif mereka.

"Kita datengin bupatinya langsung, maka berkenanlah bupati tersebut memberikan insentif Rp 300 ribu per bulan, kepada sekitar 100-1.500 orang. Kalau di Kalimantan Selatan itu ada yang 2.900, dan itu diberikan Rp 500 ribu per bulan," ucapnya.

Di beberapa provinsi, lanjut Said, ada besaran insentif yang awalnya Rp 200 ribu per bulan kini naik menjadi Rp 500 ribu per bulan. Di Balikpapan, guru-guru tersebut sudah ada yang mendapat Rp 1 juta per bulan. Menurut dia, bila besaran insentif ini cukup, mereka tidak lagi memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Said menjelaskan, besaran insentif yang layak bagi para guru *ngaji* itu sebetulnya Rp 2 juta. Angka ini sudah cukup untuk menanggung, misalnya ongkos transportasi, dan kebutuhan pangan sehari-hari. "Tapi, mereka tidak pernah berkeluh-kesah, karena dia tahu kemuliaan Alquran itu," ujarnya.

Rendahnya tingkat kesejahteraan guru ngaji tidak menyurutkan semangat BKPRMI untuk meningkatkan kompetensi mereka. Said menjelaskan, BKPRMI telah menyelenggarakan pelatihan rutin tiap tiga bulan di berbagai tingkatan daerah, mulai kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Pelatihan ini sebagai bentuk pembinaan kepada para guru tentang pengajaran membaca Alquran.

"Jadi, kapasitas mereka itu sudah sesuai dengan standar. Mereka minimal itu S1, harus S1 dan sudah memahami Alquran. Tidak harus lulusan pondok pesantren, tapi misalnya lulusan dari kampus-kampus seperti UIN," tutur dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

Kamaruddin Amin menuturkan, pemerintah memberikan stimulasi berupa insentif untuk guru pendidikan Alquran, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP), dan bantuan kepada lembaga-lembaga Mitra Pendidikan Alquran.

Kamaruddin melanjutkan, insentif itu untuk meningkatkan semangat para guru pendidikan Alquran. Menurut dia, guru-guru tersebut merupakan entitas pendidikan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. "Nilai besaran insentif ini beragam. Kalau dari Kemenag (di DIPA) Kanwil nilainya Rp 3 Juta per tahun. Kalau Pemprov Jawa Tengah Rp 1,2 juta per tahun, Pemprov DKI sekitar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta per bulan," ujar dia, kemarin.

Menurut dia, Kemenag pun memberikan stimulus bantuan pembangunan ruang belajar dan bantuan rehabilitasi ruang kelas pendidikan Alquran. Untuk penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan Alquran, saat ini pemerintah bersama masyarakat penyelenggara pendidikan Alquran dan pesantren tahfiz sedang menata kelembagaannya.

Kamaruddin juga mengungkapkan, Kemenag sedang berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada layanan pendidikan Alquran. Terutama untuk masyarakat urban dan perkotaan. Menurut dia, pihaknya tengah menyelesaikan Standar Kompetensi Kerja Nasional guru Alquran.

Standar ini akan menjadi pedoman bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pendidikan Alquran dalam melaksanakan peningkatan kompetensi dalam bentuk sertifikasi profesi guru pada layanan pendidikan Alquran. ■ *ed: a syalaby.ichsan*

Media : Republika
Rubrik : Khazanah
Halaman : 12



Afirmasi Pendidikan Santri

● **ABDUL MUTI**

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah,
Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Ketika bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah, Kapolri Idham Aziz menyampaikan dua hal. Pertama, komitmen membangun komunikasi yang lebih intensif dengan ormas Islam. Kedua, memberlakukan aturan tersendiri bagi kalangan santri yang berminat menjadi anggota Polri. Persyaratan bagi santri dipermudah.

Kebijakan Kapolri hanyalah salah satu dari sekian banyak *privilege* bagi kaum santri. Banyak perguruan tinggi membangun karpet merah bagi para hafiz/-hafizah.

Kesempatan istimewa antara lain terbuka di perguruan tinggi Muhammadiyah. Selain itu, di UIN/IAIN dan beberapa perguruan tinggi negeri seperti Universitas Airlangga serta Universitas Negeri Sebelas Maret, banyak beasiswa juga dialokasikan oleh Kementerian Agama bagi lulusan pesantren untuk studi di perguruan tinggi.

Idealisme masa keemasan

Afirmasi pendidikan santri seakan menjadi tren kebijakan. Pertama, ada asumsi kalangan santri masih relatif tertinggal dibandingkan kelompok lainnya. Kualitas pendidikan pesantren masih relatif rendah sehingga peluang berkompetisi terbatas.

Kedua, secara ekonomi, banyak santri berasal dari keluarga menengah ke bawah. Keterbatasan ekonomi tidak memungkinkan mereka membiayai jurusan bergengsi seperti kedokteran, kesehatan, dan teknik.

Ketiga, meningkatnya idealisme para pengambil kebijakan untuk melahirkan generasi Muslim yang ideal seperti pada masa kejayaan Islam. Pada masa pertengahan, Islam mencapai kejayaan dengan kekuatan

para intelektual.

Ketika Barat dalam gulita, Islam menerangi dunia dengan karya ilmiah para ulama dalam berbagai bidang. Ada romantisme sejarah melahirkan kembali figur insan kamil yang menguasai ilmu agama dan ilmu modern. Di tengah dunia keilmuan yang dikotomis, muncul kerinduan mencetak Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, al-Farabi, al-Khawarizmi, dan sederet ilmuwan Muslim lainnya.

Afirmasi pendidikan santri memang bukan idealisme baru. Ketika menjabat menteri agama, Munawir Sadzali membuat terobosan mengirim mahasiswa, dosen, dan calon dosen IAIN menempuh studi non-agama jenjang master dan doktor ke negarane-negara Barat. Munawir berharap mereka dapat mengintegrasikan Islam dengan studi modern seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan politik.

Berebel dasar-dasar ilmu agama dan metodologi Barat, para intelektual Muslim dapat menjadi figur ideal: ulama-intelektual atau intelektual ulama.

Mereka diharapkan mampu menjelaskan dan menerjemahkan ajaran Islam dengan berbagai perspektif dan disiplin keilmuan. Idealisme masa kejayaan Islam tersebut terlihat ketika terbentuk ICMI.

Penggawa ICMI mengangkat konsep ulul-albab sebagai landasan normatif dan Habibie sebagai sosok inspiratif. Para santri didikan Barat berhimpun melakukan gerakan keilmuan melalui kajian, publikasi, dan beasiswa.

Para cendekiawan Muslim tidak hanya fasih membaca Alquran, mahir membaca kitab kuning, dan saleh beribadah tetapi juga menguasai teknologi mutakhir, lancar berbahasa Inggris, dan akrab dengan berbagai teori.

Tiga tantangan

Sudahkah idealisme tersebut terwujud? Tidak mudah menjawabnya. Namun, realitas empiris memperlihatkan betapa banyak intelektual Muslim yang sangat mumpuni. Mereka fasih membaca kitab suci dan menjelaskannya melalui berbagai disiplin keilmuan modern.

Agus Purwanto menulis buku *Nalar Ayat-ayat Semesta* yang menjelaskan Alqur-

an dengan ilmu fisika. Taufiq Pasiak dalam buku *Tuhan Dalam Otak Manusia* menjelaskan Alquran dengan neurosains. Tentu masih banyak intelektual hebat lain dengan karya serupa.

Namun, tidak mudah membentuk intelektual Muslim ideal. Setidaknya ada tiga tantangan yang harus dijawab. Pertama, para santri dan hafiz/hafizah tidak cukup hanya hafal Alquran tetapi dituntut untuk mampu memahaminya.

Realitasnya, banyak di antara mereka yang hafal secara verbalistis tetapi lemah bahkan tidak mampu menerjemahkan. Akibatnya, mereka tidak mampu mengintegrasikan dan mendialogkan Alquran dengan sains modern.

Sebagian mereka cenderung memahami Alquran secara skriptural dan eksklusif dalam mengamalkan Islam. Karena itu, diperlukan pendalaman epistemologi Islam dan metodologi integrasi ilmu.

Kedua, secara akademik, mereka dituntut memiliki kemampuan lebih. Penelitian sederhana menunjukkan kemampuan akademik para santri maupun hafiz/hafizah relatif sama. Beberapa dari mereka bahkan di bawah rata-rata. Kemampuan akademik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan nilai lebih di antara sejawat.

Ketiga, ruang aktualisasi yang lebih luas diperlukan untuk mereka dapat berkiprah. Ormas Islam dan lembaga agama diharapkan membuka pintu gerbang mereka untuk bekerja.

Kegagalan memasuki dunia kerja bisa berakibat negatif. Di tengah peluang kerja yang terbatas, mereka perlu mendapatkan keterampilan dan jiwa kewirausahaan sehingga lebih mandiri.

Afirmasi pendidikan santri layak diapresiasi. Walau demikian, afirmasi tidak seharusnya memanjakan. *Fairness* tetap diperlukan. Namun, untuk jangka panjang, pendidikan Islam harus dikembangkan sebagai institusi yang melahirkan generasi paripurna.

Mereka adalah ulama-intelektual yang mampu mengintegrasikan iman-takwa (imtak) dan ilmu pengetahuan-teknologi (iptek) dalam dirinya, masyarakat, dan bangsa. ■

Media : Republika
Rubrik : Opini
Halaman : 6

